

Vol. X/No. 3/September 2015

ISSN: 0126-4605

Buletin **BSNP**

Media Komunikasi dan Dialog Standar Pendidikan



Harmonisasi dan Koordinasi Standar Nasional Pendidikan 2015



**Refleksi Satu Tahun BSNP:
Tantangan Lembaga
semakin Berat**

Berita BSNP:

**Laura Apol: Tugas BSNP Berat Dalam
Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional**
Kunjungan Mahasiswa Program Doktor dari Michigan State University

Penanggungjawab:
Zainal A. Hasibuan

Pemimpin Redaksi:
Bambang Suryadi

Redaksi Eksekutif:
Kiki Yulianti
Nanang Arif Guntoro
Zaki Su'ud
Khomsiyah

Redaksi Pelaksana:
Teuku Ramli Zakaria

Penyunting/Editor:
Titi Savitri Prihatiningsih
Erika Budiarti Laconi
Ipong Yuwono
Djoko Luknanto

Desain Grafis & Fotografer
Arief Rifai Dwiyanto
Ibar Warsita

Sekretaris Redaksi
Ning Karningsih

Alamat:
**BADAN STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN**

Gedung D Lantai 2,
Mandikdasmen
Jl. RS. Fatmawati, Cipete
Jakarta Selatan
Telp. (021) 7668590
Fax. (021) 7668591

Email: info@bsnp-indonesia.org
Website: <http://www.bsnp-indonesia.org>

Pengantar Redaksi

Pembaca yang budiman. Tidak terasa, sudah satu tahun, anggota BSNP periode ketiga mengemban amanat yang mulia ini. Selama satu tahun berjalan, pasti banyak asam garam yang kami alami. Semuanya ini tentunya menjadi pelajaran yang sangat bermakna bagi kami. Kami juga menyadari bahwa tantangan BSNP ke depan sangat riil dan lebih berat. Dalam konteks ini, Buletin BSNP edisi ketiga ini menyajikan artikel tentang "Refleksi Satu Tahun BSNP". Selain itu, kami juga menyajikan sepuluh rekomendasi BSNP untuk perbaikan pelaksanaan Ujian Nasional. Dalam edisi ini, kami juga menyajikan kegiatan BSNP dalam bentuk berita dan foto atau gambar, diantaranya adalah kegiatan halal bihalal keluarga besar BSNP, kunjungan mahasiswa program doktor dari Michigan State University, dan uji publik draf standar nasional pendidikan. Selamat membaca.

Daftar Isi

3-5 **Harmonisasi dan Koordinasi Standar Nasional Pendidikan 2015**

6-10 **Refleksi Satu Tahun BSNP: Tantangan Lembaga Semakin Berat**

11-12 **Sepuluh Rekomendasi BSNP Untuk Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Ujian Nasional**

13-19 **Berita BSNP:**

- Laura Apol: Tugas BSNP Berat Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional (Kunjungan Mahasiswa Program Doktor dari Michigan University)
- Integrasi Data Mutlak Dilakukan: Tim Reviewer Sambut Positif Pengembangan Standar Data Sisdiknas
- Halal Bihalal BSNP: Membangun K3 dengan Makan dan Nyanyi Bersama
- Kerjasama BSNP dan Puslitjak Kemdikbud: Penelitian Pencapaian Standar Nasional Pendidikan
- BSNP Lakukan Uji Publik Draf Standar Nasional Pendidikan di 15 Provinsi (Responden Antusias Mengikuti Kegiatan dan Memberikan Masukan)
- Zainal-Bambang Terpilih Kembali Sebagai Ketua dan Sekretaris BSNP

20-24 **Lensa BSNP**

Keterangan Gambar Cover

Halal bihalal keluarga besar BSNP periode pertama, kedua, dan ketiga di Jakarta (29/7/2015) (foto atas). Kunjungan rombongan tamu dari Michigan State University ke BSNP untuk berdialog tentang sistem pendidikan nasional (foto bawah).

HARMONISASI DAN KOORDINASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 2015

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah melaksanakan rapat pleno pada tanggal 28-29 Juli 2015 dengan agenda utama Harmonisasi dan Koordinasi Standar Nasional Pendidikan Tahun 2015 serta Halal Bihalal BSNP. Acara ini melibatkan anggota BSNP Periode Pertama, Kedua, dan Ketiga dengan semangat untuk menjalin kesinambungan tali silaturahmi dan program kerja BSNP. Selama acara berlangsung, telah dibahas berbagai isu terkait dengan peran dan fungsi BSNP serta kedudukan standar nasional pendidikan. Pokok-pokok pemikiran yang muncul dalam pembahasan tersebut dirumuskan sebagai berikut.

1. Penguatan lembaga BSNP

Perlu dilakukan penguatan lembaga BSNP sebagai lembaga yang profesional, mandiri, dan independen, supaya BSNP dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam mengupayakan peningkatan mutu sistem pendidikan nasional.

Produk BSNP adalah berbagai standar untuk semua jenis dan jenjang pendidikan serta rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait penjaminan mutu pendidikan. BSNP juga memiliki tugas menyelenggarakan Ujian Nasional dan menilai buku teks pelajaran. Produk BSNP perlu dipahami dan diterapkan oleh berbagai pihak terkait. Untuk itu diperlukan regulasi yang mengatur posisi BSNP di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Koordinasi antara BSNP dengan lembaga mitra perlu ditingkatkan, termasuk pemberdayaan lembaga-lembaga di daerah.

2. Standar Nasional Pendidikan

- a. Standar Nasional Pendidikan (SNP) tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional. Untuk itu diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang SNP yang meliputi Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, serta Standar Pembiayaan.
- b. Draf standar yang sudah direkomendasikan BSNP kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan namun belum ditetapkan menjadi Peraturan Menteri, perlu dilakukan penelaahan kembali sesuai perkembangan terkini untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Menteri. Hal ini perlu dilakukan agar SNP produk BSNP bersifat mengikat pada semua satuan pendidikan secara nasional. Daftar rancangan standar terlampir.
- c. Perlu optimalisasi siklus pengembangan SNP secara keberlanjutan, antara standar-standar yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan menjadi Peraturan Menteri. Siklus tersebut adalah pengembangan standar yang menjadi kewenangan BSNP, kemudian diterapkan oleh setiap satuan pendidikan, selanjutnya dilakukan pengecekan standar oleh badan akreditasi (BAN-PT, BAN-SM, dan BAN-PNF) dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif baik oleh Direktorat Pembinaan pada kementerian, Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, dan satuan pendidikan itu sendiri untuk perbaikan peningkatan standar dalam upaya penjaminan mutu pendidikan (memenuhi atau melampaui SNP). Siklus pengembangan SNP ini belum berjalan secara optimal.



- d. Pengembangan dan implementasi SNP harus memberikan sumbangan pada peningkatan mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sebagai bentuk pengejawantahan revolusi mental dalam proses pendidikan.
- e. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) perlu mengakomodasi variasi dan kebutuhan semua jenis dan jenjang pendidikan tinggi.
- f. Kegiatan BSNP tahun 2016 adalah sebagai berikut:
 - 1) Pengembangan Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Kesetaraan
 - 2) Pengembangan Standar Tes Adaptif Berbasis Komputer
 - 3) Penyusunan Standar Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 4) Pemantauan dan Evaluasi Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dan Kepala Sekolah
 - 5) Pemantauan Implementasi Standar dalam Akreditasi
 - 6) Pengembangan Standar Kelembagaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi

3. Kualitas lulusan

- a. Kualitas lulusan kita pada umumnya masih memprihatinkan, meskipun dari segi peraturan dan SNP telah banyak dikembangkan dan ditetapkan menjadi peraturan menteri. Perlu peningkatan upaya untuk memenuhi atau melampaui SNP agar pendidikan nasional menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dalam dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta memiliki daya saing dalam kancah nasional maupun internasional.
- b. Standar Kompetensi Lulusan setiap jenjang pendidikan perlu diper tegas sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan internasional serta dengan mempertimbangkan daya saing bangsa dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) serta persaingan global lainnya.

4. Posisi pendidikan nonformal

Khususnya lembaga kursus dan pelatihan dalam sistem pendidikan nasional perlu diperkuat dengan mengembangkan SNP untuk lembaga kursus dan pelatihan dan memetakannya ke

Sebagian dari anggota BSNP periode pertama (2005-2019) dan periode kedua (2009-2014) berpose bersama setelah menyampaikan pokok-pokok pemikiran mereka dalam acara harmonisasi dan koordinasi standar nasional pendidikan di ruang rapat BSNP (28-29/7/2015)

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sebagai bagian dari *Asean Qualification Reference Framework (AQR)* dalam MEA.

5. PAUD

- a. Perlu dihindari formalisasi pendidikan anak usia dini (PAUD). Ada kecenderungan menjadikan PAUD seperti “sekolah” dengan “kurikulum” tertentu yang tidak sesuai dengan perkembangan anak usia dini.
- b. Perlu dilakukan peningkatan kualitas guru PAUD melalui berbagai pelatihan profesional.

6. Otonomi daerah dan dampaknya terhadap dunia pendidikan

- a. Perlu ada kejelasan peran, tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi dalam rangka penjaminan mutu pendidikan (memenuhi atau melampaui SNP).
- b. Perlu ada nota kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait dengan pengelolaan pendidikan. Penerapan otonomi daerah membawa implikasi bahwa peraturan daerah (Perda) dan peraturan dari Kemendagri mendapat prioritas untuk dilaksanakan.
- c. Perlu dilakukan pemberdayaan unit-unit yang ada di daerah seperti LPMP, Dewan Pendidikan Daerah, Pengawas Sekolah, dan lain-lain terutama terkait implementasi dan pemantauan SNP.
- d. Perlu dikaji kembali UU 23/2015 tentang peralihan kewenangan pengelolaan pendidikan dari Kab/Kota ke Provinsi supaya pengelolaan pendidikan di daerah dapat berjalan optimal dan harmonis.

7. Ujian Nasional

Penyelenggaraan UN seyogianya ditangani oleh lembaga mandiri yang kredibel, dipercaya, dan independen dengan wewenang eksekusi (*single authority*), namun tetap melibatkan peran BSNP sebagai pengaruh kebijakan.

8. Kualitas guru

- a. Perlu penguatan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) antara lain dengan mengendalikan jumlah lulusan untuk membatasi jumlah suplai guru baru dan meningkatkan kualitas guru.
- b. Perlu dihitung kembali jumlah guru yang akan pensiun per tahun dan kebutuhan guru untuk setiap mata pelajaran. Hasilnya perlu dijadikan rujukan dalam mengendalikan jumlah lulusan pendidikan menengah yang akan melanjutkan ke LPTK tidak terjadi suplai yang berlebihan (*over supply*).
- c. Perlu dilakukan kajian mendalam tentang pemenuhan standar pembukaan prodi LPTK di PTN dan PTS sehingga tidak terjadi *overcapacity* dan *oversupply* sebagai suatu upaya pengendalian mutu lulusan agar dihasilkan guru berkualitas tinggi.
- d. Pelibatan LPTK dalam proses perencanaan dan pengadaan guru berdasarkan analisis kebutuhan guru per daerah (kabupaten/kota).
- e. Perlu dilakukan rekrutmen guru secara nasional.
- f. Perlu dilakukan penguatan program pelatihan, induksi dan mentoring guru.
- g. Perlu dilakukan pengembangan kurikulum pelatihan guru yang responsif dengan kebutuhan aktual.
- h. Perlu ada pelaksanaan pendidikan profesi guru bagi calon guru baru dengan pola beasiswa dan berasrama.
- i. Perlu ada pembatasan mahasiswa calon guru di LPTK swasta.

9. Perbukuan

- a. Perlu dikembangkan sistem penilaian buku pelajaran yang betul-betul ideal dalam konteks pendanaan dan SDM sehingga dapat menghasilkan buku bermutu yang dipakai dalam proses pembelajaran.
- b. BSNP perlu mendorong agar rancangan UU Perbukuan Nasional (sudah masuk dalam daftar Prolegnas—Program Legalisasi Nasional) bisa sesegera mungkin diundangkan. ●

REFLEKSI SATU TAHUN BSNP

Tantangan Lembaga Semakin Berat

Bambang Suryadi*

Tidak terasa, sudah satu tahun kita mengemban amanat di BSNP sejak dikukuhkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada hari Kamis (14/8/2014) di Gedung A Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selama satu tahun ini dapat dipastikan banyak asam dan garam yang kita rasakan dan banyak catatan terkait dengan BSNP jilid tiga. Diantaranya adalah “gaung BSNP jilid tiga kurang terasa”. Ada lagi “Ibarat lebah, BSNP memiliki madu, tetapi tidak memiliki sengat”. Terlepas sejauh mana kebenaran pernyataan tersebut, setelah satu tahun menjalankan tugas dan amanat di BSNP, kita perlu melakukan refleksi diri. Refleksi ini sengaja saya tulis untuk dijadikan bahan muhasabah atau evaluasi diri. Dengan harapan, perjalanan tiga tahun ke depan menjadi lebih baik dari yang sekarang, sebab tantangan BSNP ke depan semakin konkrit dan berat. Ibarat sebuah kapal yang mengarungi lautan, angin dan ombak yang kita hadapi jauh lebih dahsyat dan kuat.

Sedikit mengingat sejarah pembentukan lembaga ini, BSNP pertama kali dibentuk pada bulan Mei 2005 dengan masa kepengurusan empat tahun yang bersifat kolektif kolegial. Sampai sekarang ini sudah dua periode berjalan dan kita pada periode ketiga. Artinya, saat ini usia BSNP sudah satu dekade (10 tahun). Dalam sebuah organisasi atau lembaga, usia 10 tahun pertama merupakan *formation period* yang sangat penting dalam menentukan tahap perkembangannya.

Ada empat tugas pokok yang diemban BSNP, yaitu pengembangan, pemantauan implementasi, dan evaluasi standar, penyelenggaraan ujian nasional, penilaian buku teks pelajaran, dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan daerah yang terkait dengan penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Dalam melaksanakan tugas, BSNP bersifat pro-

fesional dan independen. Tantangan BSNP ke depan, secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu tantangan internal dan eksternal.

Tantangan internal

Ada beberapa tantangan internal yang dihadapi anggota BSNP periode 2014-2018. Pertama, jumlah anggota BSNP periode tiga ini hanya 11 orang, sementara pada dua periode



Anggota BSNP periode ketiga (2014-2018).

sebelumnya 15 orang. Dalam PP 19/2005 sebagaimana telah diubah menjadi PP 32/2013 tentang standar nasional pendidikan disebutkan, keanggotaan BSNP maksimal 15 orang dan sekurang-kurangnya 11 orang. Jumlah anggota yang hanya 11 orang ini tidak sebanding dengan kompleksitas tugas, kewajiban, dan tanggungjawab yang diemban. Demikian juga dukungan SDM di sekretariat BSNP juga sangat terbatas. Di satu sisi, jumlah SDM sekretariat terbatas, dan di sisi lain, dari segi status kepegawaian, mayoritas mereka adalah pegawai honorer. Singkat kata, sumber daya manusia BSNP terbatas, sementara tugas semakin banyak.

Ibarat permainan sepak bola atau permainan lainnya, jika jumlah pemain kurang dari jumlah yang semestinya (ideal), pasti akan memengaruhi kualitas permainan. Demikian juga anggota BSNP yang semula 15 orang menjadi 11 orang, secara langsung maupun tidak langsung, pasti akan berpengaruh

* Anggota BSNP dan dosen Fakultas Psikologi UIN Jakarta

terhadap kinerja lembaga.

Menyadari adanya keterbatasan SDM yang tidak seimbang dengan tugas yang diemban, BSNP sesuai dengan PP 19/2005, memiliki kewenangan untuk membentuk tim ahli yang bersifat ad hoc. Namun perlu diingat bahwa, tugas dan pekerjaan bisa dibagi tetapi tanggungjawab tidak bisa dibagi. Artinya tanggungjawab terhadap tugas yang diamanatkan PP 19/2005 tetap ada pada anggota BSNP, bukan pada pihak lain di luar lembaga.

Dari perspektif gender, keanggotaan BSNP periode ketiga telah memenuhi kesetaraan gender. Pada periode pertama, dari 15 anggota BSNP ada dua orang perempuan, sedangkan pada periode kedua semua anggota BSNP adalah laki-laki. Pada periode ketiga, dari sebelas orang anggota ada empat orang "Srikandi". Namun, komposisi gender ini juga berpotensi menimbulkan dampak tertentu terhadap pola kerja, solidaritas, komunikasi, interaksi, suasana kebatinan, dan iklim kerja lembaga.

Kedua, tantangan kelembagaan. Meskipun BSNP bersifat independen, dalam penganggaran kegiatan masih menyatu dengan DIPA Balitbang Kemdikbud. Dalam konteks ini, ada potensi terjadinya ketidaksinkronan antara idealisme dan pragmatisme atau antara harapan dan kenyataan. Sehingga dalam kondisi tertentu, masih terjadi "*function follows money*", yang semestinya "*money follows function*".

Masih dalam konteks kelembagaan, BSNP tidak memiliki jaringan struktural di daerah, baik di provinsi maupun di kab/kota. Hal ini berpotensi menjadi kendala dalam mengimplementasikan kebijakan BSNP. Respon dari daerah cenderung "lamban" jika tidak ada garis struktural.

Ketiga, jam kerja anggota BSNP periode ketiga berbeda dengan periode pertama dan kedua. Pada periode pertama dan kedua, anggota BSNP melakukan rapat pleno seminggu sekali pada hari Selasa. Sedangkan kegiatan pengembangan standar dilakukan di luar rapat pleno, sebanyak 10 langkah kegiatan dalam setahun, masing-masing kegiatan dua hari.

Pada periode ketiga, sesuai dengan SK pengukuhan, anggota BSNP bekerja sepenuh waktu, lima hari kerja dalam

seminggu. Meskipun tuntutan kerja ini belum dapat dilaksanakan secara optimal dalam satu tahun pertama ini. Dengan demikian anggota periode ketiga dituntut untuk lebih produktif, inovatif, dan kreatif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. Konsekuensinya, tuntutan kerja ini mesti berdampak terhadap kinerja di kampus, sebab anggota BSNP adalah akademisi dari berbagai perguruan tinggi.

Keempat, sistem honorarium. Sejak periode pertama sampai ketiga, anggota BSNP tidak menerima gaji bulanan. Mereka dibayar berdasarkan kegiatan (*activity based*). Anggota yang hadir dalam kegiatan baik rapat pleno maupun pengembangan standar, akan diberi honorarium. Mereka yang tidak hadir, tidak menerima honor. Dengan pola ini memang dapat memotivasi anggota BSNP untuk aktif dalam kegiatan. Ibarat pepatah Jawa "obah opah". Oleh karena itu, komitmen terhadap pekerjaan (*task commitment*) menjadi sangat penting supaya tugas yang diamanatkan dapat terlaksana.

Dalam hal ini, saya salut dan harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anggota BSNP, mulai periode pertama sampai periode ketiga. Hanya spirit, niat yang kuat, *passion*, *task commitment*, dan kecintaan mereka untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui peningkatan kualitas pendidikan nasional yang memotivasi mereka bekerja keras dengan penuh dedikasi dan komitmen. Tanpa spirit seperti ini, kredibilitas BSNP akan berkurang.

Tantangan Eksternal

Selain tantangan internal, BSNP juga menghadapi tantangan eksternal. Pertama, tantangan kemitraan. Mulai tahun 2015, BSNP bermitra dengan dua Kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan seluruh direktorat terkait. Lingkup standar yang dikembangkan BSNP sangat luas, mencakup jenjang pendidikan mulai dari PAUD sampai ke Pendidikan Tinggi, serta mencakup pendidikan formal dan nonformal. Selama satu dekade ini, BSNP masih fokus kepada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sementara pendidikan

tinggi dan pendidikan nonformal masih sedikit yang ditangani.

Kedua, ekspektasi dan harapan publik terhadap BSNP sangat tinggi. Namun, masih terdapat kesalahan persepsi dalam memahami peran dan fungsi BSNP. Mereka menganggap BSNP sebagai lembaga yang mampu memberikan pemikiran dan solusi atas segala permasalahan pendidikan mulai dari A sampai Z. Mereka juga masih beranggapan BSNP sebagai *executive agent*, padahal posisi BSNP adalah sebagai *council* yang menyusun kebijakan, bukan sebagai implementor kebijakan. Bahkan istilah BSNP, masih sering disebut BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).

Ketiga, banyak produk BSNP yang belum dipahami sepenuhnya, apalagi diimplementasikan oleh mitra kerja BSNP, mulai dari Direktorat/Badan/Pusat di Kementerian sampai dengan Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan. Oleh sebab itu, sampai sekarang, dengan jujur saya katakan, BSNP belum bisa memberikan informasi (data) yang valid dan akurat sejauh mana ketercapaian standar nasional pendidikan yang dikembangkan dan apa kendala dalam mengimplementasikan SNP tersebut. Hal ini karena sampai saat ini belum ada kajian yang komprehensif, sejauh mana standar nasional pendidikan sudah dicapai. Selama ini, kajian (pemantauan dan evaluasi standar) masih bersifat parsial (per standar), sehingga kita tidak tahu ketercapaiannya berapa dan apakah standar ini perlu dinaikkan atau tidak.

Keempat, masih ada kesenjangan dan ketidaksinkronan antara regulasi pendidikan dan otonomi daerah serta keuangan negara. Sebagai contoh, standar yang dikembangkan BSNP menetapkan A, tetapi regulasi di daerah menetapkan B. Terkait dengan guru, misalnya, masih terdapat berbagai masalah atau PR yang perlu kita selesaikan. Distribusi guru yang tidak merata antara kota dan desa. Proses mutasi guru juga tidak mudah karena guru menjadi wewenang daerah. Belum lagi kualitas guru kita yang masih perlu ditingkatkan.

Strategi dan Solusi

Dari dua jenis tantangan tersebut,

menurut hemat saya, justru tantangan internal yang lebih berat dan menjadi prioritas, sebab tantangan internal ini berdampak langsung terhadap kinerja BSNP. Rasulullah sendiri, pernah mengingatkan kaum muslimin setelah selesai perang Badar (tantangan eksternal), musuh dan tantangan yang lebih berat adalah menghadapi hawa nafsu (tantangan internal). Saya yakin dan optimis, jika tantangan internal ini bisa diselesaikan, maka sebagian besar tantangan eksternal dan tugas-tugas BSNP lainnya dapat diselesaikan.

Nah, dalam diskusi internal BSNP, Ketua BSNP pernah menawarkan *Agile Approach* atau *zig zag approach*. Sebuah pendekatan yang tidak mesti terpaku atau terikat pada pola dan pakem kerja tertentu, tetapi bisa mencapai sasaran dan target yang dicita-citakan. Lebih lanjut, Ketua BSNP juga memberikan otokritik dan catatan penting sebagai bahan refleksi bersama. Secara lengkap, saya salin sebagai berikut.

“Mohon maaf, kalau saya mau otokritik, (1) masih banyak diantara kita (termasuk saya) tidak membuat persiapan sewaktu akan pleno, (2) masih banyak (termasuk saya) yang selagi rapat mengerjakan tugas-tugas lain yang tidak berhubungan dengan BSNP, (3) masih banyak (termasuk saya) yang tidak bisa mengikuti rapat BSNP secara penuh, karena satu dan lain hal, (4) masih banyak (termasuk saya) yang tidak disiplin dengan deliverable (hasil) kerjanya. Bagi saya, yang paling penting adalah yang nomor 4. Mohon maaf atas otokritik ini”.

Sebagai bahan renungan, muhasabah, instropeksi diri, dan evaluasi diri, otokritik tersebut sangat penting bagi masing-masing anggota BSNP dalam rangka melakukan konsolidasi internal dan membangun komunikasi dengan mitra kerja dari Balitbang, Direktorat, BAN-PT, BAN S/M, BAN PNF, Puspendik, Puskurbuk, Puslitjak, Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru dan mitra lainnya.

Dalam rapat pleno BSNP, Rabu (12/8/2015), baru saja dilakukan pemilihan Ketua dan Sekretaris untuk tahun kedua. Oleh karena itu, memasuki tahun kedua perjalanan BSNP, kita harus solid secara internal. Ibarat sebuah bangunan, masing-masing bagian dan komponen dari bangunan tersebut memiliki peran

dan saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Atau ibarat sebuah organ tubuh, masing-masing organ dan bagian tubuh kita saling terkait, tidak bisa dipisahkan, sehingga jika ada bagian yang sakit, semua organ tubuh akan merasakan sakit.

Salah satu strategi dan cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mempertahankan pola kepemimpinan kolektif kolegial yang selama ini diterapkan di BSNP. Selain itu, kita perlu menjunjung tinggi *local wisdom*: kebersamaan dalam keragaman (*unity in diversity*), keharmonisan dalam perbedaan (*harmony in diversity*), duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, mengutamakan kepentingan lembaga daripada kepentingan pribadi, tidak ada superioritas atau inferioritas. Dengan memegang *local wisdom* dan prinsip tersebut, BSNP jilid III akan lebih kuat dalam pemikiran akademik, kemandirian dan kolegialitas. Dengan demikian akan terwujud *united effort* sehingga kita mampu melihat permasalahan pendidikan nasional secara utuh, tidak hanya berdasarkan satu sudut pandang saja. Ke depan, meminjam istilah Pak Ucok, BSNP juga perlu bersikap secara preemptive, proaktif, menjemput bola, dan tidak menunggu bola. Atau meminjam istilah Pak Zaki, ibarat sebuah kesebelasan tim sepak bola, kita perlu bermain dengan strategi "*total football*".

Terkait dengan deliverable (hasil) pekerjaan, tiga prinsip kerja BJ. Habibie masih relevan untuk kita terapkan, yaitu (1) tepat waktu, (2) tuntas, (3) dan berkualitas. Dalam konteks ini, bekerja tepat waktu saja tidak cukup, tetapi harus tuntas. Bahkan, tepat waktu dan tuntas juga tidak cukup, tetapi harus berkualitas. Atau, bisa juga kita mengikuti tiga prinsip kerja Dahlan Iskan, yaitu (1) kerja keras, (2) kerja cerdas, dan (3) kerja ikhlas. Perpaduan dari kedua prinsip kerja Habibie dan Dahlan Iskan ini, bisa menjadi pegangan kita dalam bekerja.

Mengambil momentum peringatan Kemerdekaan Indonesia ke-70, tema yang diusung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah "Gerakan Nasional Ayo Kerja, 70 Tahun Indonesia Merdeka". Dalam hal kerja,

ada wisdom yang perlu kita ingat, yaitu "Pekerjaan itu kalau dicari banyak, kalau dibicarakan tidak habis, tetapi kalau dikerjakan kurang".

Selanjutnya, apa yang kita kerjakan, kita serahkan kepada Allah, sesuai dengan firman-Nya dalam Qur'an, Surat At-Taubah, ayat 105, yang artinya "*Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan*".

Selama tiga tahun ke depan, BSNP perlu menguatkan fondasi, menentukan strategi, dan menetapkan prioritas kerja. Keberlanjutan dan *chemistry* hubungan BSNP dengan mitra kerja perlu diperkuat melalui koordinasi dan komunikasi yang lebih baik. Penguatan lembaga BSNP secara eksternal dan internal sehingga tugas BSNP bisa berjalan secara seimbang dan baik. Rencana kerja BSNP selama tiga tahun ke depan perlu dimatangkan dan dibahas bersama mitra kerja, terutama Kemendikbud dan Kemenristek DIKTI. BSNP juga perlu memikirkan, "**Kemana Arah Pendidikan Nasional**", "bagaimana model UN masa depan". Sejauh mana standar yang dikembangkan diterapkan dan ketercapaiannya". Lebih lanjut, BSNP perlu membangun "**Arsitek Standar Nasional Pendidikan**".

Terakhir, kita harus menyadari betul bahwa posisi BSNP bukan sebuah *super body* yang mampu mengatasi dan menyelesaikan semua permasalahan pendidikan nasional. Di sisi lain, kita harus meyakini bahwa posisi BSNP sangat strategis untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang membawa kemajuan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional. Oleh sebab itu, membangun *smart partnership* menjadi kunci utama, setelah kita solid secara internal. Mengingat, saat ini kita merupakan generasi (periode) ketiga, maka kita juga mesti bersikap bijak dengan berpegang pada prinsip "*al-muhafadhah ala al-qadim al-shalih, wa al-akhdu bi al-jadid al-ashlah*", artinya mempertahankan warisan lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik".

Doa Dan Harapan

Sebagai penutup, dengan memegang prinsip kolektif kolegial, kita harus saling ingat-mengingatkan dan nasehat-menasehati. Semua yang kita kerjakan ini akan sia-sia dan tidak bermakna jika kita salah niat. Untuk itu, marilah kita memperbarui niat (tajdid niat) dengan berdo'a kepada Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Ya Allah, sungguh tugas yang diberikan kepada anggota BSNP periode 2014-2018, merupakan satu tanggung jawab besar yang sebenarnya beban ini terlalu berat bagi kami semua. Tapi karena ini sebuah amanat, maka dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada kami, kami menerima tugas ini sebagai bentuk komitmen kami dan kecintaan kami dalam meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini.

Ya Allah, kami menyadari selama ini kami lalai bahwa kami bekerja untuk pekerjaan. Semestinya kami bekerja untuk mendapatkan RidhaMu. Apa yang kami kerjakan selama ini semestinya bukan semata-mata sebagai urusan duniawi, tetapi sebagai urusan Ilahiyah dan urusan-Mu Ya Allah.

Ya Allah, kami menyadari tantangan ke depan semakin berat dan kompleks, baik yang menyangkut standar, ujian nasional, penilaian buku teks pelajaran, kurikulum, kualitas guru,

dan permasalahan pendidikan lainnya.

Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk secara bersama-sama kita besarkan, kita kuatkan lembaga BSNP ini. Berikanlah kekuatan kepada kami semua urusan yang kami lakukan di BSNP sebagai urusanMu ya Allah, bukan urusan pekerjaan semata.

Ya Allah, satukanlah hati kami, kekuatan dan potensi kami dengan berbagai keragaman yang ada pada kami. Jadikanlah kami team work yang solid, kompak, akrab, harmonis, dan dinamis dengan segala keragaman dan perbedaan yang kami miliki.

Ya Allah, hanya kepadaMu lah kami menyembah dan meminta pertolongan. Tunjukkanlah kami kepada bahwa yang benar itu benar dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil (salah) itu batil (salah), dan jauhkanlah kami dari kebatilan tersebut.

Ya Allah, kuatkanlah niat dan tekad kami dan kuatkanlah kekompakan, persatuan, persaudaraan, kekeluargaan, dan kebersamaan antara kami dengan saling menghargai dan menghormati, tanpa mencari kesalahan atau menyalahkan pihak lain.

Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta jagalah kami dari sentuhan api neraka.

•

Ketua, anggota, dan seluruh staf BSNP

Turut berduka cita dan bela sungkawa sedalam-dalamnya
atas berpulangnya ke rahmat Allah

IBU SATINEM

(86 tahun)

Ibunda dari Ning Karningsih

staf Sekretariat BSNP

Pada hari Selasa, 11 Agustus 2015 di Cilacap.

Semoga Allah menerima amal baik almarhumah, memberikan ampunan dan menempatkan arwahnya di tempat yang mulia di sisi-Nya.

Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga Allah memberikan ketabahan dan kesabaran. Amin.



Sepuluh Rekomendasi BSNP Untuk Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Ujian Nasional

Sebagai lembaga independen yang memiliki tugas menyelenggarakan Ujian Nasional (UN), BSNP selalu melakukan evaluasi pelaksanaan UN dan hasilnya dijadikan dasar dalam membuat kebijakan. Untuk melaksanakan evaluasi UN tahun 2015, BSNP membentuk tim ahli yang bersifat ad hoc dengan anggota sebanyak lima belas orang pakar dalam bidang pengukuran, penilaian, dan evaluasi pendidikan serta statistika. Sebagai ketua tim adalah Bahrul Hayat, Ph.D.

A. Rekomendasi

Berdasarkan hasil studi Evaluasi Ujian Nasional melalui *focused group discussion*



Dari kiri ke kanan, Bahrul Hayat, Ph.D Ketua Tim Evaluasi Ujian Nasional, Zainal A. Hasibuan Ketua BSNP dan Totok Supriyatno Kepala Balitbang Kemdikbud berbincang-bincang sesuai pembahasan rekomendasi tentang ujian nasional di ruang rapat BSNP (29/6/2015)

session (FGD) dan pengumpulan data melalui angket di 15 (lima belas) Provinsi serta serangkaian diskusi pendalaman Tim Ahli Evaluasi Ujian Nasional, kami menyampaikan rekomendasi sebagai berikut.

Rekomendasi 1: Ujian Nasional sebagai Quality Control (QC)

Pemerintah melalui kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melanjutkan kebijakan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) yang berbasis pada standar nasional pendidikan sebagai alat pengendali mutu lulusan (*Quality Control*) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Rekomendasi 2 : Ujian Nasional untuk Sertifikasi

Pemerintah menggunakan hasil Ujian Nasional untuk sertifikasi lulusan, sebagai bukti dan pengakuan pencapaian kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang bersifat nasional

Rekomendasi 3: Ujian Nasional untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara pendidikan secara sungguh-sungguh menggunakan analisis terhadap hasil ujian nasional dan menggunakannya untuk melakukan berbagai intervensi kebijakan dalam rangka meningkatkan mutu sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Rekomendasi 4: Ujian Nasional sebagai Dasar Seleksi

Dalam rangka menjamin keadilan, pemerataan, efektifitas, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah menggunakan hasil Ujian Nasional sebagai dasar pertimbangan penerimaan peserta didik pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi.

Rekomendasi 5: Penjaminan Mutu untuk Ketuntasan Belajar

Pemerintah melakukan secara sungguh-sungguh proses penjaminan mutu sekolah/madrasah melalui penguatan proses belajar mengajar berbasis ketuntasan belajar (*mastery learning*) disertai penilaian hasil belajar di kelas secara berkelanjutan oleh guru.

Rekomendasi 6: Otoritas Penyelenggara Ujian Nasional

Pemerintah memperkuat kelembagaan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai otoritas yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Ujian Nasional. Penguatan kelembagaan dimaksud meliputi aspek Kewenangan, Organisasi, Sumber Daya Manusia, Keuangan dan sumber daya lainnya. Dalam pelak-

sanaan teknis operasional UN, BSNP dapat mendelegasikan kewenangan teknis pelaksanaannya kepada Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Rekomendasi 7: Penguatan Peran Puspendik dalam Ujian Nasional

Pemerintah memperkuat Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam aspek kewenangan, struktur organisasi, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan keuangan yang mendukung teknis operasional penyelenggaraan Ujian Nasional. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Puspendik dapat mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi.

Rekomendasi 8: Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Ujian Nasional

Ujian Nasional dapat diselenggarakan dengan jadwal bersamaan atau tidak, secara terpusat atau terdesentralisasi, sepanjang memenuhi prinsip objektivitas, komparabilitas, kredibilitas, akuntabilitas, dan profesionalitas sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Rekomendasi 9: Perluasan Ujian Nasional Berbasis Komputer

Pemerintah memperluas pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UN-BK) dengan mendayagunakan dan/atau meningkatkan sarana prasarana pendukung yang tersedia di sekolah/madrasah dan/atau lembaga lainnya di daerah. Dalam jangka panjang Pemerintah perlu merintis pelaksanaan Ujian Nasional dalam *Computerized Adaptive Testing* (CAT)

Rekomendasi 10: Teknis Pelaksanaan Ujian Nasional

Untuk meningkatkan kualitas, objektivitas, komparabilitas, kredibilitas dan keamanan ujian nasional, Pemerintah melakukan:

- a. Pengembangan dan pengelolaan bank soal yang terkalibrasi secara nasional agar terjamin ketersediaan soal ujian nasional yang berkualitas;

- b. Pelaksanaan Ujian Nasional yang konsisten sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS), termasuk pemberian sanksi tegas bagi yang melanggar;
- c. Kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional harus agar tidak mengondisikan guru di sekolah/madrasah mengkonsentrasikan kegiatan belajar mengajar pada upaya mempersiapkan diri menghadapi UN dengan mengabaikan mata pelajaran lain yang tidak diujikan secara nasional.
- d. Pelaporan nilai Ujian Nasional dinyatakan dalam bentuk skor berskala interval (*scaled-score*), dengan menerapkan metodologi mutakhir, bukan skor berdasarkan banyaknya jawaban yang benar;
- e. Pelaporan hasil Ujian Nasional dirumuskan dalam bentuk deskripsi tentang pencapaian kompetensi untuk setiap mata ujian yang dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh Sekolah/madrasah, Dinas Pendidikan Provinsi, Kab/Kota dan Kantor Kementerian Agama, Kab/kota, dan Provinsi;
- f. Pengkajian dan penelitian secara khusus tentang kemungkinan pelaksanaan UN yang hanya wajib bagi peserta didik yang menghendaki sertifikat berstandar nasional (UN yang bersifat *non-mandatory*).

Untuk menindaklanjuti 10 (sepuluh) rekomendasi sebagaimana dimaksud di atas, pemerintah perlu melakukan penyempurnaan dan penguatan peraturan perundang-undangan yang diperlukan. Pemerintah juga melakukan penyebaran informasi kebijakan nasional terkait ujian nasional secara tepat, akurat dan menyeluruh sehingga berbagai pihak (pemangku kepentingan) dan masyarakat luas memahami dengan benar filosofi, fungsi, dan manfaat Ujian Nasional bagi peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Pemerintah menyusun peta jalan (*road map*) dan langkah-langkah terencana menuju terwujudnya sistem Ujian Nasional yang kredibel (*credible*) dan dapat diterima oleh semua pihak (*acceptable*).

Rekomendasi ini juga berlaku untuk pelaksanaan Ujian Nasional pendidikan dasar dan menengah pada jalur non-formal. ●

LAURA APOL: TUGAS BSNP BERAT DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN NASIONAL

Kunjungan Mahasiswa Program Doktor dari Michigan State University



Mahasiswa program doktor (S3) dari Michigan State University berkunjung ke BSNP untuk berdialog tentang sistem pendidikan nasional (9/6/2015). Kunjungan ini merupakan kunjungan kedua, sedangkan kunjungan pertama dilakukan pada tanggal 21/5/2013.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai lembaga profesional dan indepenen yang memiliki kewenangan mengembangkan standar nasional pendidikan, menjadi daya tarik bagi pemangku kepentingan pendidikan, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Hal ini terbukti dengan banyaknya tamu, baik secara individu maupun rombongan, yang datang ke BSNP. Salah satu perguruan tinggi di luar negeri yang melakukan kunjungan ke BSNP adalah rombongan dari Michigan State University (MSU) sebanyak 22 orang dengan rincian dua orang dosen dan 20 mahasiswa program doktor, pada hari Selasa (9/6/2015). Kunjungan ini merupakan kunjungan kedua, sedangkan kunjungan pertama dilakukan pada tanggal 21/5/2013.

Sebagai ketua rombongan adalah Dr. Laura Apol dan Dr. Lynn Paine dan sebagai koordinator kunjungan adalah Isabella Tirtowaluyo. Selain itu, juga ada dua orang pendamping dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yaitu Prof Pardjono dan Dr. Dwi Yuliantoro. Dengan demikian ada 24 orang dalam kunjungan tersebut. Para mahasiswa yang mengikuti program ini mewakili dari berbagai jurusan, diantaranya adalah pendidikan guru, kurikulum dan pengajaran, pengukuran, kebijakan pendidikan, administrasi pendidikan, psikologi sekolah, dan teknologi pendidikan.

Menurut Laura Apol tujuan kunjungan ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia dan isu-isu terkini yang terkait dengan kebijakan pendidikan nasional.

"Kami sengaja menjadikan BSNP sebagai prioritas utama lembaga yang kami kunjungi dengan maksud untuk mendapatkan gambaran tentang peran dan fungsi BSNP, standar nasional pendidikan dan isu-isu terkini yang terkait dengan kebijakan pendidikan nasional", ungkap Laura Apol seraya menyampaikan terimakasih atas kesediaan BSNP menerima rombongan.

Zainal A. Hasibuan Ketua BSNP dalam sambutannya mengatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia sejak tahun 2003 menganut aliran sistem pendidikan berbasis standar atau *standard based education system* dan lembaga yang berwenang mengembangkan standar adalah BSNP.

"Reformasi pendidikan nasional pada tahun 2003 ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-undang ini, secara tegas dan jelas sistem pendidikan yang diterapkan adalah sistem pendidikan berbasis standar", ungkap Zainal alumni Illinois University tersebut.

Pada sesi tanya jawab dan dialog, banyak pertanyaan yang muncul dari rombongan MSU. Pertanyaan mereka berkisar tentang

* Bambang Suryadi

proses pengembangan standar, perubahan kurikulum, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan dan implementasi standar, pemantauan standar, keragaman budaya dan bahasa, dan akuntabilitas terhadap publik dalam penerapan standar.

Semua pertanyaan tersebut dijawab oleh anggota BSNP secara bergiliran yang dinakhodai oleh Ketua BSNP. Pada akhir pertemuan dilakukan pemberian cinderamata dari kedua belah pihak, sesi foto bareng, serta makan siang bersama. Cara menyambut tamu seperti ini memberikan kesan yang positif kepada rombongan.

"Kami, atas nama rombongan dari MSU menyampaikan terimakasih kepada BSNP yang telah menerima kami selama dua setengah jam dan kami mendapatkan apa yang kami inginkan. Kesan kami, tugas BSNP sangat berat dan kompleks dan orang-orang yang ada di sini memiliki komitmen yang tinggi terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui standar", ungkap Laura Apol seraya menambahkan selain ke BSNP rombongan juga akan mengadakan kunjungan ke Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta beberapa perguruan tinggi di Indonesia. (BS)

INTEGRASI DATA MUTLAK DILAKUKAN

Tim Reviewer Sambut Positif Pengembangan Standar Data Sisdiknas



Kegiatan review draf standar data sistem pendidikan nasional di ruang sidang BSNP (27-28/6/2015). BSNP mengundang berbagai pemangku kepentingan, diantaranya, Badan Pusat Statistik (BPS), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Pusdatin Kemnaker, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Kependudukan Negara (BKN), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama.

Salah satu permasalahan pendidikan kita saat ini adalah masalah pendataan. Banyak data, tapi pemanfaatannya sangat terbatas. Interaksi antar pengelola dan sumber data masih belum jelas. Sementara, anggaran yang dialokasikan untuk pendataan sangat tinggi. Oleh sebab itu, integrasi data sistem pendidikan nasional mutlak dilakukan untuk peningkatan layanan mutu pendidikan abad dua puluh satu.

Demikian catatan penting dari proses review draf standar data sistem pendidikan nasional yang dilaksanakan BSNP pada hari Sabtu dan Minggu, 27-28 Juni 2015, di Jakarta. Hadir dalam acara ini reviewer dari berbagai pemangku kepentingan, diantaranya, Badan Pusat Statistik (BPS), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Pusdatin Kemnaker, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Kependudukan Negara (BKN), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama.

I Made Wiryana Wakil Ketua Tim Ahli

dalam paparannya menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan fondasi data sistem pendidikan nasional sehingga data yang ada bisa diintegrasikan.

"Integrasi dalam arti ada pertukaran data, pengambilan data, dan pemanfaatan data. Dengan adanya integrasi data ini, akan terjadi efisiensi dalam hal biaya/anggaran, tenaga, dan waktu", ucap Made.

Lebih lanjut Made menegaskan dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kita mampu melakukan integrasi data, tanpa mengganggu sistem data yang ada.

Masalah

Sudarminto dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengungkapkan dengan adanya standar data Sisdiknas ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan data pendidikan di lapangan. Selama ini, pihak pelaksana di lapangan sering mengalami masalah dengan adanya perbedaan antara satu data dengan

data yang lain untuk maksud dan tujuan yang sama. Keluhan yang lain adalah, adanya permintaan data yang sama dari pihak yang berbeda. Sebagai contoh, pada bulan tertentu ada permintaan data untuk DAPODIK dan sebulan kemudian ada lagi permintaan data untuk PADAMU NEGERI.

Saking rumitnya masalah pendataan selama ini, tambah Sudarminto, di kalangan pihak sekolah sampai ada ungkapan, "Iki sing diurusi Dinas Pendidikan opo tho, kok namane data mbulet terus". Artinya, Sebenarnya yang diurusi Dinas Pendidikan itu apa sih, kok yang namanya data tidak pernah tuntas.

Apa yang disampaikan Sudarminto juga diiyakan R. Danudilaga dari Pusat Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Di dalam satu kementerian banyak data yang ditangani oleh masing-masing direktorat, namun data-data ini belum terintegrasi sehingga pemanfaatannya kurang optimal. Menyadari kondisi seperti ini, maka Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi telah membuat kebijakan perlunya dilakukan link and machth antar pusat data yang ada di dalam kementerian", ungkapnya seraya menambahkan banyak data dikumpulkan, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Sebab mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan data masih belum ada kesepakatan.

Harapan

Rumtini dari LPDP menyambut baik rencana BSNP mengembangkan standar data Sisdiknas. Melalui kegiatan ini diharapkan pada masa depan nanti ada standar data yang baku dan kredibel.

Optimisme untuk menghasilkan data yang terintegrasi juga disampaikan oleh Fadhilah Marthar dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Saya optimis, pengembangan standar data Sisdiknas ini akan bisa menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan data sehingga kita dapat menguatkan NKRI. Sekarang ini saat yang tepat untuk melaukan 'taubatan nasuha' atas ketidakberesan data yang ada di lembaga atau kementerian", ucapnya.

Harapan yang sama juga disampaikan Sudarminto dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

"Dengan adanya standar data sisdiknas, kami yang berada di lapangan berharap standar ini memudahkan kami dalam memberikan layanan publik", ucap Sudarminto yang pernah menjadi kepala sekolah selama sembilan tahun.

Namun demikian, masih terdapat sedikit kekhawatiran di kalangan reviewer, jika standar data Sisdiknas ini diterapkan akan mengusik sistem data yang sudah ada. Menanggapi kekhawatiran ini, Ketua BSNP, Zainal A. Hasibuan merespon dengan elegan bahwa BSNP tidak akan membangun sistem data baru dan tidak akan menggantikan sistem yang sudah ada.

"Melalui kegiatan pengembangan standar data sistem pendidikan nasional ini, kita dari BSNP tidak akan mengembangkan sistem data baru. Kita juga tidak akan mengusik sistem data yang sudah ada", ungkap Ucok panggilan akrab Ketua BSNP seraya menambahkan kegiatan ini merupakan langkah awal untuk menghasilkan fondasi data sehingga bisa terjadi interfacing antar data di berbagai kementerian dan lembaga.

Bagi Eko Indrajit memiliki pandangan serupa terkait dengan urgensi pengembangan standar data sisdiknas ini.

"Secara nasional kita membutuhkan arsitektur data sistem pendidikan nasional. Jangan sampai dana pendidikan sebanyak 20% itu salah sasaran dan semuanya dialokasikan berdasarkan data", ungkap anggota BSNP periode II tersebut.

Best practice yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Surabaya bisa dijadikan contoh. Saat ini, orang tua yang ingin mengetahui nilai rapor anak tidak harus datang ke sekolah. Tetapi cukup mengeceknya lewat internet atau smartphone dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun, demikian, jika ada orang tua yang ingin datang ke sekolah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang perkembangan siswanya, tidak menutup kemungkinan. (BS)

HALAL BI HALAL BSNP: Membangun K3 dengan Makan dan Nyanyi Bersama

Acara halal bi halal yang dikemas dengan makan dan nyanyi bersama ternyata sangat efektif untuk membangun kebersamaan, keakraban, dan kekeluargaan (K3) bagi anggota BSNP periode pertama, kedua, dan ketiga, (28/7/2015) di Jakarta.

Zainal A. Hasibuan Ketua BSNP, dalam sambutannya mengatakan bahwa telah menjadi tradisi BSNP untuk melakukan halal bi halal setiap tahun untuk mempererat tali silaturahmi, sehingga apapun yang kita lakukan mendapat ridha Allah swt. Tradisi



Kemesraan ini. Janganlah cepat berlalu... Lirik lagu yang dinyanyikan bersama dalam halal bihalal BSNP di Jakarta (28/7/201)

ini akan terus kita lanjutkan tidak hanya dalam bentuk halal bi halal tetapi juga dalam pertemuan-pertemuan lainnya.

Melalui makan bersama, selain memenuhi *basic need*, juga menjadi media untuk saling berbagi informasi dan pengalaman. Sementara itu nyanyi bersama sangat efektif untuk mencairkan suasana dan releasing tension. Kesan-kesan berikut ini memperkuat pernyataan tersebut.

"Sederhana dan penuh makna", kesan singkat seorang anggota BSNP yang sengaja tidak mau disebut namanya.

"Berbagai perasaan dan pikiran yang selama ini timbul akibat tuntutan kerja, bisa sirna dan tergantikan dengan energi baru yang lebih positif", ungkap anggota yang lain.

Dengan merujuk filosofi Jawa, seorang anggota BSNP periode pertama menuturkan, "BSNP (melalui acara seperti ini) telah mukul duwur, mendem jero lan ngumpulke balung pecah". Artinya, BSNP telah berpikuk jauh ke depan dengan pertimbangan yang matang, serta telah menyatukan tulang (anggota) yang terpecah-pecah.

Sementara itu, ceramah hikmah halal bi halal disampaikan T. Ramli Zakaria Anggota BSNP. Menurut Ramli tujuan akhir dari puasa adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa, yaitu pribadi yang berakhlak mulia.

Semoga kebersamaan, keakraban, dan kekeluargaan (K3) ini tetap terjaga selamanya. Amin. (BS)

KERJASAMA BSNP DAN PUSLITJAK KEMDIKBUD: Penelitian Pencapaian Standar Nasional Pendidikan

BSNP dan Pusat Penelitian Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan dialog kebijakan dan bersepakat untuk bekerjasama dalam menyediakan data-data dan hasil penelitian kebijakan terkait dengan pencapaian standar nasional pendidikan. Dari kerjasama ini, diharapkan, setiap tahun ada laporan mutu pendidikan nasional. Kebijakan yang dikaji adalah standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan bersifat mengikat seluruh satuan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Turut hadir dalam acara yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2015 di ruang rapat BSNP ini adalah

ketua, sekretaris, dan seluruh anggota BSNP serta Kepala Puslitjak Kemendikbud, Bambang Indrayanto.

Menurut Ketua BSNP Zainal A. Hasibuan BSNP memiliki kewenangan mengembangkan dan mengevaluasi implementasi standar, tetapi tidak memiliki tugas dan fungsi melakukan penelitian. Oleh karena itu bermitra dengan Puslitjak untuk melakukan penelitian merupakan langkah yang sangat strategis dan membawa kemanfaatan bagi banyak pihak.

"Pertemuan kita hari ini merupakan langkah awal untuk membangun kemitraan dengan berbagai pihak, terutama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu juga sebagai usaha kongkrit BSNP

dalam membangun ekosistem standar nasional pendidikan”, ucap Zainal yang memimpin rapat.

Lebih lanjut Zainal menjelaskan bahwa dalam ekosistem standar pendidikan nasional, setiap lulusan satuan pendidikan mestinya memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketetapan standar dan memenuhi tuntutan dari dunia kerja. Untuk kualifikasi diatur dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sedangkan yang terkait dengan profesi diatur dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

bukan untuk mencampuri tugas dan fungsi BSNP, tetapi secara bersama-sama untuk bisa menyajikan data yang valid, reliabel, dan akurat yang bisa dijadikan dasar pembuatan kebijakan”, ucapnya seraya menambahkan jangan sampai ketidakakuratan data yang dipakai untuk membuat kebijakan itu salah.

Sementara itu, Nanang Arif Guntoro anggota BSNP menyoroti siklus pengembangan standar yang belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pertemuan antara BSNP dan Puslitjak merupakan langkah yang sangat penting untuk menindaklanjuti berbagai isu-

Pembahasan rencana pelaksanaan penelitian tentang capaian standar nasional pendidikan di BSNP dengan menghadirkan Bambang Indriyanto (kiri) Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



“Saat ini masih ada kesenjangan antara *maturity level* lulusan satuan pendidikan dengan tuntutan kerja di lapangan. Tingkat kelulusan dari satuan pendidikan sangat tinggi –hampir seratus persen lulus—tetapi kompetensi yang mereka miliki tidak sesuai dengan tuntutan dunia kerja”, ucap Zainal.

Bambang Indriyanto Kepala Puslitjak menyambut baik rencana BSNP ini. Bahkan pertemuan seperti ini telah ia canangkan sejak dua tahun yang lalu.

“Saya sudah merencanakan untuk melakukan dialog kebijakan seperti ini sejak dua tahun yang lalu. Oleh karena itu, penting untuk saya tegaskan, kehadiran saya di sini

isu pendidikan, terutama yang terkait dengan analisis hasil UN, akreditasi, dan sertifikasi guru.

Zaki Su’ud anggota BSNP menekankan pentingnya pembuatan sistem evaluasi yang valid dalam implementasi standar nasional pendidikan.

“Jika kita mampu membuat sistem evaluasi yang valid, maka sebagian masalah pendidikan bisa diselesaikan. Namun masalahnya, data-data yang ada kurang valid. Sementara BSNP tidak mungkin melakukan semua hal, maka peran Puslitjak sangat penting dan strategis untuk melakukan penelitian capaian standar nasional pendidikan”, ucapnya. (BS)

BSNP LAKUKAN UJI PUBLIK DRAF STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI 15 PROVINSI

Responden Antusias Mengikuti Kegiatan dan Memberikan Masukan

BSNP melaksanakan uji publik dan *Focus Group Discussin* (FGD) untuk pengembangan, pemantauan, dan evaluasi standar nasional pendidikan di lima belas provinsi pada bulan Agustus 2015. Dua standar yang dikembangkan adalah standar data sistem pendidikan nasional dan standar penilaian

berbasis TIK. Sedangkan pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk standar kompetensi lulusan (SKL), Standar Isi (SI), standar proses, dan standar penilaian. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, BSNP bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi.

Teknis pelaksanaan kegiatan ini dibagi



Responden dari guru di Lampung serius membaca dan mengisi instrumen pemantauan standar nasional pendidikan (15/8/2015). Kegiatan uji publik dan FGD dilakukan di 15 provinsi yang dibagi dalam tiga tahap.

menjadi tiga tahap. Tahap pertama di Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Banten, dan Jawa Barat mulai tanggal 7 sampai dengan 9 Agustus 2015. Tahap kedua di Sumatera Utara, Bangka Belitung, Lampung, Bali, dan DKI, mulai tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus 2015. Tahap ketiga di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan NTT mulai tanggal 21 sampai dengan 23 Agustus 2015.

Menurut Zainal A. Hasibuan Ketua BSNP, tujuan uji publik dan FGD ini adalah untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari responden terkait dengan substansi dan keterbacaan draf standar yang dikembangkan dan kesesuaian standar dengan kondisi yang ada dan tuntutan masa depan. Sedangkan tujuan dari pemantauan dan evaluasi standar adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi standar tersebut di lapangan, termasuk kendala-kendala yang dihadapi serta solusinya.

Kegiatan ini, tambah Ucok--panggilan akrab Ketua BSNP, merupakan bagian dari delapan langkah pengembang/pemantauan standar. Uji publik/FGD ini merupakan langkah keenam, dan setelah uji publik masih ada dua langkah kegiatan, yaitu analisis hasil uji publik/FGD dan penyusunan rekomendasi dan laporan. Seluruh tahapan kegiatan ini direncanakan selesai pada bulan November.

Secara terpisah Hafidz Muksin PPK BSNP mengatakan bahwa kegiatan ini melibatkan anggota BSNP sebagai koordinator, tim ahli, pejabat dinas pendidikan, panitia setempat, dan responden.

"Di setiap provinsi ada lima belas responden, seorang anggota BSNP, dua orang

tim ahli untuk masing-masing standar, dua orang staf sekretariat dan tiga orang panitia dari Dinas Pendidikan Provinsi sebagai mitra di daerah," ucap Hafidz dalam rapat koordinasi persiapan di kantor BSNP.

Sementara itu, dari uji publik tahap pertama dan kedua dilaporkan bahwa peserta dari siswa, guru, kepala sekolah, komite sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan sangat antusias mengikuti kegiatan.

"Anak-anak berani menyampaikan apa yang mereka alami di sekolah. Sangat antusias dan menyampaikan pendapat mereka secara obyektif, dengan apa adanya. Betul-betul autentik apa yang mereka sampaikan", ucap pak Adnan Latief tim ahli yang bertugas di Jawa Timur.

Dari pengamatan penulis, selama acara berlangsung, para kepala sekolah, pengawas, komite dan responden lainnya merasa senang dilibatkan dalam acara uji public dan FGD ini. Mereka merasa mendapat pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga. Namun, responden dari anggota DPRD yang menangani bidang pendidikan, berhalangan hadir pada uji publik tahap pertama dan kedua di 10 provinsi.

"Kami sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan BSNP ini. Kami sudah mendapat ilmu, bisa menyampaikan keluhan-keluhan yang selama ini kami hadapi, terus dapat sertifikat dan uang transport", ucap salah satu peserta uji publik dan FGD dari kelompok guru.

Dari provinsi Lampung, disampaikan bahwa terkait dengan empat standar yang dipantau, secara umum, ada beberapa komponen yang tidak sinkron antara standar kompetensi lulusan, standar isi, kompetensi inti,

kompetensi dasar, dan indikator. Guru-guru di lapangan juga mengalami kesulitan ketika melakukan penilaian terutama penilaian autentik, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan.

"Penilaian dalam kurikulum 2013 sangat detail, kompleks, dan rinci sehingga memerlukan waktu yang cukup lama, sementara guru memiliki beban mengajar 24 jam tatap muka dalam seminggu. Sehingga penilaian kurang bisa dilakukan secara obyektif", ungkap salah satu peserta FGD dalam kelompok guru di kota Lampung.

Para guru mengusulkan supaya penilaian sikap dan keterampilan dibuat lebih sederhana, disediakan format yang baku dan perlu

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam melakukan penilaian sehingga bisa lebih efektif dan efisien.

Untuk mengukur efektifitas pelaksanaan uji publik dan FGD, Balitbang Kemdikbud pada waktu yang bersamaan juga melakukan monitoring.

"Monitoring ini dimaksudkan untuk mengukur efektifitas pelaksanaan uji publik dan FGD di daerah. Dari hasil monitoring akan dijadikan perbaikan pelaksanaan uji publik dan FGD pada masa mendatang", ungkap Hafidz Muksin seraya menambahkan biaya monitoring dan evaluasi ini sepenuhnya dibebankan ke Balitbang Kemdikbud, tidak ke BSNP. (BS)

Anggota BSNP periode ketiga (2014-2018) berpose bersama setelah acara pemilihan ketua dan sekretaris di ruang rapat BSNP (12/8/2015). Secara mufakat, Zainal A. Hasibuan (kelima dari kanan) dan Bambang Suryadi (keenam dari kiri) terpilih sebagai Ketua dan Sekretaris untuk satu tahun ke depan.



ZAINAL-BAMBANG TERPILIH KEMBALI SEBAGAI KETUA DAN SEKRETARIS BSNP

Salah satu agenda rapat pleno BSNP tanggal 12 Agustus 2015 adalah pemilihan Ketua dan Sekretaris BSNP untuk periode satu tahun ke depan. Menurut tata kelola BSNP, ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota untuk masa bakti satu tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu tahun berikutnya. Sebagaimana kita ketahui, anggota BSNP periode tiga ini dikukuhkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 14 Agustus 2014. Oleh karena itu, menjelang habisnya masa bakti tersebut, dilakukan pemilihan ketua dan sekretaris.

Proses pemilihan berjalan dengan kondusif, lancar dan secara mufakat, seluruh anggota menyetujui Zainal A. Hasibuan dan Bambang Suryadi untuk mengemban amanat sebagai Ketua dan Sekretaris untuk satu tahun ke depan dengan beberapa alasan dan pertimbangan.

"Selama satu tahun ini merupakan masa *formation period*, sehingga diperlukan penguatan organisasi, baik secara internal

maupun eksternal", ungkap salah satu anggota BSNP seraya menambahkan kepemimpinan yang ada perlu dilanjutkan.

Sementara anggota yang lain beranggapan bahwa cara dan ritme kerja antara ketua dan sekretaris selama ini sudah seirama. Ketua telah membangun kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan, sementara sekretaris menangani dan mengkoordinir urusan internal BSNP.

Mengingat tantangan BSNP ke depan sangat riil dan semakin berat, maka memasuki tahun kedua ini, diperlukan kerja keras, cerdas, dan ikhlas. Salah satu caranya adalah dengan mempertahankan sistem kepemimpinan kolektif kolegial dengan meningkatkan komitmen, dedikasi, dan partisipasi dari masing-masing anggota dan staf sekretariat. Meminjan istilah Zaki Su'ud, ibarat bermain sepak bola, BSNP perlu menerapkan strategi *total football*.

Selamat mengemban amanat. Semoga BSNP pada tahun kedua ini menjadi lebih baik. Amin. (BS)

Suasana Focus Group Discussion (FGD) tentang implementasi standar proses di Provinsi Lampung (14-16/8/2015)



M. Aman Wirakartakusumah didampingi Sugiarto tim ahli pemantauan standar penilaian, memimpin acara Focus Group Discussion (FGD) bersama siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA di Lampung (15/8/2015).



BSNP bersama Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) membahas persiapan pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2016 di ruang rapat BSNP (13/8/2015). Nizam (kanan) Kepala Puspendik menyampaikan salah satu persiapan yang dilakukan adalah penyusunan kisi-kisi UN yang memuat lingkup materi dari Kurikulum 2006 (KTSP) dan Kurikulum 2013.



Bambang Indriyanto Kepala Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan rencana penelitian yang bisa disinkronkan dengan pengukuran capaian standar nasional pendidikan di ruang rapat BSNP (12/8/2015). BSNP tidak memiliki tugas dan fungsi melakukan penelitian, maka pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan oleh mitra kerja BSNP.

Rapat pembahasan rencana perubahan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (11/8/2015). Setelah dua belas tahun diundangkan, sudah saatnya undang-undang tersebut direvisi dengan menyesuaikan cita-cita bangsa dan tuntutan masa depan. Dalam rapat ini, BSNP diundang sebagai nara sumber.



Suasana Focus Group Discussion (FGD) bersama siswa dari SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA saat pengumpulan data pemantauan implementasi standar proses di Surabaya (8/8/2015). Acara ini dipandu oleh tim ahli Ali Syaukah (kiri) dan Abuddin Nata (kanan).



Dari kiri ke kanan, Komaruddin Hidayat, Haedar Bagir, dan Fasli Jalal sebagai nara sumber dalam acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) masa depan di ruang rapat BSNP (5/8/2015). Melalui FGD ini, akan dirumuskan format dan bentuk SKL untuk menyiapkan generasi emas pada tahun 2045. FGD dipimpin oleh Suyanto (tidak nampak dalam gambar), mantan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus sebagai anggota tim ahli.



Sebagian anggota BSNP periode pertama beserta istri berpose bersama setelah acara halal bihalal di Jakarta (28/7/2015). Lambaian tangan mereka memberikan optimisme dan semangat kepada anggota BSNP periode ketiga untuk meneruskan perjuangan dan kiprah mereka. Turut hadir dalam acara ini Nizam Kepala Puspendik (berdiri, kiri).



Dari kiri ke kanan, Komaruddin Hidayat, Bambang Soehendro, keduanya anggota BSNP periode pertama dan Zainal A. Hasibuan Ketua BSNP periode ketiga, dengan serius tapi santai, saling bertukar informasi dan pemikiran tentang peran dan fungsi standar nasional pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan.



Suasana pembukaan Uji publik draf standar nasional pendidikan di Banten (7-9/8/2015)

Telah menjadi tradisi di BSNP untuk membangun tali silaturahmi dan kesinambungan antara periode melalui acara halal bihalal di Jakarta (28/7/2015). Sebagian anggota BSNP periode I, II, dan III duduk bersama untuk saling tukar informasi dan pemikiran dalam acara hala bihalal tersebut.



Pembahasan kebijakan Ujian Nasional tahun 2016 di BSNP (26/8/2015). Totok Supriyatno Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian Kemdikbud (kiri) didampingi Zainal A. Hasibuan Ketua BSNP menyampaikan pokok-pokok pemikiran untuk perbaikan pelaksanaan UN 2016.





Tim ahli standar data sistem pendidikan nasional berpose bersama reviewer setelah menelaah draf standar di ruang rapat BSNP (27/6/2015)

Zainal A. Hasibuan Ketua BSNP (kiri) menyampaikan terimakasih kepada Djuandi (kanan) staf sekretariat BSNP atas pengabdianya. Djuandi akan kembali ke Bandung dan berkarir bersama keluarga. Semoga berkah. Amin.



Staf sekretariat dan keuangan BSNP berpose bersama dalam acara halal bihalal keluarga besar BSNP di Jakarta (29/7/2015)

Sebagian anggota BSNP periode ketiga (2014-2018) bersama suami/istri, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (berdiri, keempat dari kanan) dan staf profesional dalam acara halal bihalal di Jakarta (29/7/2015)



Kunjungi Website kami di:

<http://www.bsnp-indonesia.org>

ISSN 0126-4605

